

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana setiap orang atau kelompok memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat (Kurniawan, 2015; Nasution, 2020) termasuk memberikan kritik kuat terhadap pemerintah (Irwanto dan Leliana, 2019) dalam bingkai demonstrasi (Sabela, 2017) sekalipun. Terlebih dalam bahasan ontologis Pendidikan Kewarganegaraan disebutkan bahwa hak asasi manusia yang bersifat pribadi seperti hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul (Junaidi, 2013; Suleiman, 2016) dalam rangka mempengaruhi pengambilan kebijakan publik (Lipset, 1995) tidak diperbolehkan mendapatkan restriksi, melainkan dalam kondisi darurat (Budiardjo, 2007). Walaupun konsep demokrasi dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan masih memberikan perdebatan, tetapi dalam pemaknaan demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pemaknaan terhadap titik keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara termasuk pada persaingan politik (Newton dan Deth, 2020). Dengan demikian, pelaksanaan pemerintah harus berimbang dengan hak-hak warga negaranya.

Melihat dari realitas pemaknaan demokrasi tersebut, maka gerakan populis mendapatkan sebuah legalitas penuh dalam sebuah demokrasi. Salah satu bentuk legalitas dari adanya gerakan populis tersebut adalah dilihat pada corak jaminan hak asasi manusia. Berdasarkan laporan dari *Economist Intelligence Unit* menyebutkan bahwasannya konfigurasi norma demokrasi mulai terkikis habis dengan pembatasan ruang kebebasan mengemukakan pendapat, rendahnya kepercayaan publik pada lembaga pemerintahan, penurunan popularitas partai politik bahkan sampai pada penurunan kebebasan sipil (Mulyadi, 2018). Oleh karena itu, gerakan populisme tidak serta merta dikualifikasikan sebagai ancaman demokrasi, hanya karena memberikan sebuah bentuk penolakan untuk selalu tunduk dan bersikap kritis pada penguasa. Label ancaman terhadap demokrasi secara serampangan, justru memberikan indikasi bahwa proses demokrasi selama ini merupakan struktur lapisan signifikansi yang terlihat hirarkis, sementara

struktur terdalam menjadi kohesivitas dari kesatuan oligarkis, yang hanya mempergunakan dukungan rakyat sebagai dalih untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan resistensi dengan membungkam suara sumbang.

Menurut Choi dan WuHorie (2018) menyebutkan bahwasannya dalam wacana politik ranah institusional tidak hanya saja mendapatkan sebuah legitimasi terkait kebijakan pemerintah, melainkan juga mampu mengakomodasi perbedaan pandangan yang mungkin kontras terlihat. Dalam tingkat signifikansi tertentu, gerakan populis tidak ubahnya oposisi bergerak cepat dalam menganalisis kelemahan konsentrasi perhatian pemerintah yang terpolarisasi (Sommer dan McCoy, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Ludger (2018) menyebutkan bahwasannya sulit sekali melakukan pengembangan reposisi yang lebih moderat. Dengan berbagai spektrum yang tampak, populisme dapat menjelma menjadi wacana oposisi yang memberikan kontribusi epik terhadap pemerintah dengan menekankan pada kausalitas berbagai isu sosial yang terabaikan pemerintah (Clerici, 2020; Pedrazzini, 2017). Namun demikian, gerakan terukur populisme yang menjadi bagian alami dalam perkembangan demokrasi Indonesia justru dewasa ini diinterpretasikan secara brutal dengan rasionalitas yang cacat.

Diskursus gerakan populis mendapatkan momentum yang relevan atas keberhasilan Donald Trump yang menduduki jabatan sebagai presiden Amerika Serikat, yang tentunya mengejutkan bagi banyak kalangan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Trump merupakan seorang yang mendapatkan *labeling* demagog demokrasi dalam perjalanan karirnya (Levitsky dan Ziblitz, 2020, hlm. 25). *Labeling* demagog demokrasi tersebut, tampak pada perhatiannya dari kalangan pekerja kulit putih yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang memadai selama pemerintahan presiden Barack Obama (Fukuyama, 2016). Dimensi corak ketimpangan tersebut tidak jarang melakukan afiliasi dengan Anglo Saxon Protestant yang diinfiltrasi ke dalam propaganda selama kampanye politik (Rubaidi, 2020). Selain daripada itu, fenomena yang relevan juga tampak pada keputusan bulat parlemen Inggris untuk membebaskan dari regulasi Uni Eropa, karena mendapatkan dukungan populis kanan masyarakat Inggris yang dipimpin oleh Nigel Farage (Perdana, 2019). Gerakan populis secara empirik dapat memberikan implikasi pada kenaikan simultan perolehan suara partai yang

membawa isu sentimen sebagai manuver populis mencapai 7% dekade ini dengan kenaikan kursi berkisar 9% di negara Eropa (Norris dan Inglehart, 2019).

Dalam pendekatan diskursif, populisme akan memberikan penekanan tentang konstruksi lapisan pemaknaan politik melalui homogenitas opini publik berkenaan pada harapan dan realitas kekuasaan. Harapan tersebut akan terlihat semakin realistis dengan balutan persamaan karakteristik sebagai simbol bersama melalui proses diskursif dengan agenda populis tertentu (Laclau, 2005). Sementara dalam pendekatan ideasional, populisme justru memiliki konsentrasi terbatas pada ruang dimensi ide, retorika dan agenda politik yang menunjukkan pada diferensiasi antara publik dan kelompok penguasa yang tidak menjadikan kehendak umum sebagai suatu prioritas dalam kebijakan bersama (Mudde, 2007). Terakhir, dalam pendekatan multi kelas populisme justru tidak menempatkan hanya pada konfigurasi organisasi dan gerakan politik, melainkan memberikan pendalaman komprehensif terkait stabilitas institusi dan aksentuasi sosial material (Hadis dan Robinson, 2017).

Dalam perdebatan kajian teoretis, sampai saat ini dimensi konsepsi dari populisme bahkan masih berada pada pemaknaan yang ambiguitas. Hal tersebut menjadikan implikasi rasional bahwasannya tidak terdapat argumentasi yang pakem terhadap signifikansi populisme, terlebih pada struktur analisis dari kajian komparatif kasus global dalam perspektif diferensial (Margiansyah, 2019). Menurut Hameleers (2018) menyebutkan bahwasannya populisme selalu merepresentasikan isu bahwa kelompok elite tidak hanya berhadapan dengan kebuntuan dan kegagalan dalam memberikan pemaknaan terhadap kehendak publik secara relevan, melainkan juga diperburuk dengan pemberian eksklusivitas kelompok tertentu dalam masyarakat. Populisme berada dalam perlintasan kelompok elitis yang mapan dan masyarakat yang merasakan riskan dengan desain permasalahan sebagai akuisisi kelompok elitis dalam jalur tersebut sehingga dapat menimbulkan jurang diametral terbuka (Norris dan Inglehart, 2016). Salah satu contohnya adalah manifestasi kehendak publik yang tidak mendapatkan perhatian khusus oleh penguasa dan tidak jarang hadir dalam etnisitas dan agama (Mudde, 2014; Jager, 2005).

Di Indonesia, pergerakan dari populisme agama atau populisme Islam mendapatkan titik momentum krusial pada tahun 2016 sampai pemilihan presiden tahun 2019 dengan puncaknya pada perkembangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jakarta (Azra, 2021, hlm. 32). Tidak menutup kemungkinan bahwa kebangkitan populisme Islam sebagai fase resonansi dari situasi global yang kemudian diadopsi secara distingtif oleh sejumlah negara di Asia (Arifin, 2019). Menurut Choliludin (2019) menyebutkan bahwasannya dalam perkembangannya, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas kelompok muslim, maka pada fase puncaknya populisme Islam sedari masa reformasi terjadi dimana ruang publik menjadi sarana untuk melakukan diseminasi berbagai ide konservatif.

Putra (2019) menegaskan bahwasannya kebangkitan populisme Islam merupakan suatu kondisi alamiah dalam negara pluralisme, Azra (2021) menyebutkan tidak lebih dari gejala religio politis belaka. Geertz (1992) menyebutkan bahwa agama merupakan sistem simbol dalam menginterpretasikan suasana hati dan motivasi sebagai pengalaman mentalitas yang bertahan kuat dalam diri manusia melalui pengaturan berkenaan dengan kehidupan yang nyata sehingga terlihat sangat realitas.

Pada kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 sebagai puncak terbentuknya gerakan populisme Islam sebagai politik identitas yang secara sporadis menghasilkan preferensi pilihan bebas dalam proses demokrasi (Prayogi, 2019). Gerakan populis tersebut merupakan pola implikasi langsung dari pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur Jakarta yang pada saat itu menyinggung Qur'an Surat Al-Maidah. Pernyataan demikian, tentu menimbulkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat muslim yang kemudian dimobilisasi oleh GNPF MUI dan FPI (Riyadi dan Derajat, 2019). Salah satu gerakan perlawanan tersebut adalah Aksi Bela Islam yang diikuti oleh berbagai kelompok organisasi dengan motivasi berbeda yang mencerminkan terhadap korelasi di antara gerakan sosial dengan populisme Islam (Pratama, 2021).

Menurut Jayanto (2019) menyebutkan bahwasannya pergerakan

Edah Jubaedah, 2022

KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASIPANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

populisme Islam konservatif dengan rangkaian Aksi Bela Islam yang berada dalam kutub diametral terbuka berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Najibudin (2019) bahwa dalam aksi tersebut juga mencoba untuk merepresentasikan dua agenda politik krusial yaitu menolak pemimpin non muslim dan dominasi Tionghoa. Penolakan terhadap pemimpin non muslim, tidak lain dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memperjuangkan Islamisasi ruang publik sebagai tanda dari pos sekularisme yang sekaligus menjadi pertahanan dalam kekuatan pasar, sehingga tidak mengherankan bila pergeseran populisme Islam konservatif dinilai sebagian kalangan sebagai terminologi ancaman serius terhadap demokrasi (Naufan dan Hannase, 2021). Oleh karena itu, kebangkitan populisme Islam konservatif memberikan potensi untuk merusak kebhinekaan bangsa Indonesia, bahkan dalam *channel youtube* Narasi, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menilai bahwa populisme Islam konservatif berpotensi merusak kebhinekaan bangsa Indonesia yang tidak disertai dengan legitimasi yang cukup kuat.

Dilansir dari BBC News dalam Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyampaikan bahwasannya rendahnya persentase Golput pada pemilu tahun 2019 berkisar 19,24% salah satunya terkait erat dengan politik identitas yang dinilai menjadi ancaman kuat terhadap kelompok minoritas. Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengukuhkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan suara berkisar 85 juta lebih, sementara pada pasangan Prabowo-Sandi tertinggal jauh dengan suara 44,5%. Hal menarik terkait keberhasilan Jokowi yang juga berkaitan politik identitas yang dicemaskan kelompok minoritas adalah konfigurasi provinsi yang memberikan kontribusi signifikan. Di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan mutlak dengan corak wilayah dari populisme Islam, termasuk di beberapa propinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara dan Papua Barat. Di lain pihak, Prabowo dan Sandi hanya menang signifikan di provinsi dengan mayoritas muslim seperti Aceh, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

Demokrasi mempunyai konstruksi sempurna manakala terdapat pemilihan umum yang kredibel (Santoso dan Supriyanto, 2004), independensi peradilan

Edah Jubaedah, 2022

KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASIPANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terjaga (Rizqi, 2018), media informasi yang terpercaya (Harahap, 2009), bahkan kebebasan berekspresi yang dilindungi (Melina, 2018). Sekalipun kebebasan mengekspresikan diri menjadi pilar dalam demokrasi, namun gerakan populisme Islam tidak mungkin mendapat pembenaran ketika menghadirkan implikasi destruktif terhadap integrasi bangsa (Sihidi, dkk., 2020) dalam siluet polarisasi (Fata, 2018) melalui berbagai informasi yang tidak valid (Akmaliah, 2019, hlm. 149).

Dalam teori tentang identitas sosial disampaikan bahwa seseorang dapat mengekspresikan diri ke dalam samaran yang berbeda, tergantung pada konteks sosial. Konfrontasi dari dua kiblat populisme Islam memuat ketakutan berkenaan inklusi dan eksklusi dalam masyarakat yang disampaikan melalui propaganda populis sebagai ancaman besar terhadap masing-masing kubu yang terpolarisasi. Ketika gerakan populis Islam dalam demokrasi tidak ubahnya pertarungan akbar dengan konfigurasi kekuasaan untuk membangun persepsi kelompok agama berkenaan keberpihakan pemerintah, maka aksi bela negara merupakan konstruksi yang menjadi benteng kokoh dalam menjaga kohesivitas bangsa dengan seluruh diferensiasi yang ada (Soepandji, 2018).

Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, konsep bela negara merupakan titik kesadaran untuk melakukan pengabdian prima terhadap negara (Minto, dkk., 2019) yang didasarkan pada kecintaan (Umar, 2019) dalam momentum kesadaran epik berbangsa dan bernegara (Widodo, 2011), sebagai aktualisasi kuat filsafat Pancasila (Sukawati, 2021) untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara (Budiwibowo, 2016). Aksi bela negara yang tidak jarang diperkuat dengan pemahaman sejarah pergerakan nasional (Tuahunse, 2009) telah dikemas secara apik dan inovatif (Putri, dkk., 2020), serta tampil dalam perlintasan yang beragam (Gredinand, 2017). Bagaimana bela negara selama masa pandemi dimanifestasikan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 (Anggraeni, Dkk., hlm. 145).

Sampai saat ini, tidak terdapat satu pun penelitian yang memberikan kajian bagaimana populisme agama menjadi ancaman besar demokrasi melaluianalisis jalur prima terhadap beberapa indikator demokrasi. Sebagai cerminan belanegara, maka desain penelitian ini melakukan kajian holistik berkaitan analisis

komprehensif dan upaya memaknai kembali gerakan populis Islam dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya menjaga serta memperkuat demokrasi berkeadaban di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana kelompok agama memberikan pemaknaan terhadap fenomena gerakan populisme di Indonesia?.
2. Bagaimana konstruksi populisme agama dalam perspektif demokrasi Pancasila?.
3. Bagaimana konstruksi populisme agama dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai konstruksi populisme agama dalam demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan kontribusi dalam perwujudan penguatan demokrasi di Indonesia dalam berbagai dinamika kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam poin berikut ini:

1. Mengetahui kelompok agama dalam memberikan pemaknaan mengenai fenomena gerakan populisme agama di Indonesia.
2. Mengetahui konstruksi populisme agama dalam perspektif demokrasi Pancasila.
3. Mengetahui konstruksi populisme agama dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Konstruksi Populisme Agama dalam Demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk lebih jelasnya, penulis memberikan deskripsi rincian manfaat penelitian sebagai berikut:

Edah Jubaedah, 2022

KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASIPANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Manfaat dari segi teori dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dimana dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan objektif dalam menunjang kajian pembelajaran dalam proses pendidikan, khususnya dalam kajian ilmu politik, pendidikan sosial humaniora dan Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Manfaat dari segi kebijakan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan sumber referensi pertimbangan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya pembuatan kebijakan mengenai populisme agama di Indonesia dalam hubungannya dengan dinamika demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila di Indonesia. Selain daripada itu, kontribusi manfaat penelitian ini dari segi kebijakan dapat memberikan pertimbangan muatan dalam kebijakan kajian kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan di persekolahan maupun di tingkat pendidikan tinggi mengenai populisme agama sebagai salah satu dinamika kehidupan sosial dalam demokrasi di Indonesia dan kontribusi realitas populisme agama di Indonesia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

Manfaat dari segi praktik dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi secara konkret dalam landasan pemikiran ilmiah mengenai kajian gerakan populisme agama khususnya mengenai kajian realitas munculnya gerakan populisme agama di Indonesia, bagaimana persepsi pandangan kaum berbagai kelompok agama terhadap gerakan populisme agama yang ada di Indonesia, memberikan manfaat praktik dalam konstruksi populisme agama di Indonesia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan secara komprehensif, valid dan ilmiah.

1.4.4 Manfaat dari Segi Aksi Sosial

Penelitian ini memberikan manfaat isu sosial dimana sebuah gerakan yang nampak di lingkungan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang dinamis dan natural sehingga kajian penelitian ini memiliki implikasi pada perkembangan isu sosial yang nampak pada lingkungan masyarakat dan elit

Edah Jubaedah, 2022

KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

politik.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penelitian ini dibangun berdasarkan penulisan yang sistematis dan berkelanjutan dari setiap bab. Adapun deskripsi struktur organisasi penulisan tesis ini dapat dilihat sebagai berikut:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Pada bagian penulisan Bab I Pendahuluan ini memuat bagaimana realitas fenomena populisme Islam di Indonesia secara krusial puncaknya pada tahun 2016 hingga sampai saat ini yang memberikan pemaknaan yang bias dan serampang di masyarakat, sehingga penggiringan makna tersebut dirasa perlu untuk melakukan kajian secara komprehensif dan ilmiah agar pemaknaan populisme Islam memiliki pemaknaan yang ajeg dalam demokrasi di Indonesia. Selanjutnya dalam Bab I Pendahuluan ini juga memuat rumusan masalah penelitian khususnya mengenai bagaimana munculnya kebangkitan populisme agama di Indonesia, bagaimana persepsi pandangan berbagai kelompok agama terhadap fenomena populisme agama di Indonesia serta rumusan mengenai bagaimana konstruksi populisme agama dalam demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Pada bagian Bab I Pendahuluan juga memuat mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dilihat dari berbagai segi mulai dari manfaat segi teoritis, praktis, kebijakan dan isu sosial, sehingga dari uraian Bab I Pendahuluan ini memuat fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

1.5.2 Bab II Kajian Pustaka

Pada bagian bab ini, penulis memberikan uraian-uraian penting baik secara konsep, dalil maupun teori yang berhubungan dengan konstruksi populisme agama di Indonesia dalam demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5.3 Bab III Metode Penelitian

Pada bagian Bab III metode penelitian ini secara garis besar mendeskripsikan mengenai prosedur metode penelitian yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian. Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan validitas data.

1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bagian bab IV Temuan dan Pembahasan, berupa deskripsi mengenai temuan serta pembahasan penelitian yang disusun secara terstruktur, sistematis dan mendalam, guna memberikan penjelasan yang komprehensif. Adapun konteks yang dibahas pada bagian pembahasan berupa (1) pemaknaan kelompok agama terhadap fenomena populisme di Indonesia, (2) konstruksi populisme agama dalam perspektif demokrasi Pancasila dan (3) konstruksi populisme agama dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bagian bab V ini merupakan deskripsi dari simpulan hasil penelitian berupa simpulan secara umum mengenai penelitian, simpulan khusus dari hasil penelitian pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, deskripsi implikasi penelitian dan rekomendasi penelitian.